

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
VOLUME KE 1220/PER-UMP/2011.
MINGGAL . 11-04-2011.

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH:

Nama : Hendra Dewha Sastra

Nim : 222006033

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2011



**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH:

Nama : Hendra Dewha Sastra

Nim : 222006033

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Dewha Sastra
Nim : 222006033
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2011

Penulis,



Hendra Dewha Sastra

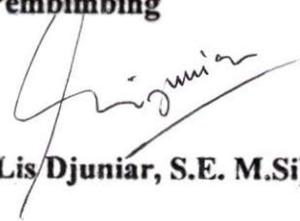
**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**Nama : Hendra Dewha Sastra
Nim : 222006033
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

**Diterima dan disyahkan
Pada tanggal.....
Pembimbing**


(Lis Djuniar, S.E. M.Si)

Mengetahui

Dekan

Ub. Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, S.E. M.Si)

MOTTO :

- "Manfaatkanlah kesempatan karena kesempatan tidak datang kedua kalinya".
- "Yang paling disesali dalam hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dipergunakan ketika mendapat Kesempatan".

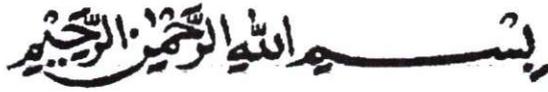
(Hendra Dewha Sastra)

Sembah sujudku kepada Allah

Kupersembahkan kepada :

- Papa dan Mama Tercinta
- Saudara-saudaraku Tersayang
- Seseorang yang kusayangi
- Almamater

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilahirrobil alamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang”.

Yang merupakan salah satu syarat dalam meraih Gelar Sarjana Strata 1 (satu) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lis Djuniar, S.E,M.Si yang telah membimbing serta memberi pengarahandan saran dengan tulus dan ikhlas dalam skripsi ini. Selain disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Bapak H. M . Idris, SE.,M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Rosyadi, SE.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.

3. Bapak M. Taufiq Syamsuddin, SE.,Ak.M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
4. Bapak Drs. Sunardi, SE.,M.Si dan Ibu Welly S.E selaku ketua dan staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Lis Djuniar, SE.,M.Si selaku Pembimbing Skripsi.
6. Ayah dan Ibu tercinta yang membesarkan dan mendidik serta selalu berdo'a untuk keberhasilan saya.
7. Keluarga besar ku yang selalu memberikan semangat dan do'a.
8. Teman-teman seperjuangan dan tak lupa sahabat ku, (Ali, Beki, Pe2ng, Dedi, Yudis, Ade, Cobra, Jon Van Der Meiman, Jon Dian, Jon Tuo) dan semua teman,sahabat yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan dorongan.
9. Kakak, Adik dan teman-teman ku di Organisasi UKM Seni dan Budaya,Yuk' Ita, K'Moelem, K'Adit, K'Heru, Po2, Ce2p, Ajes, Septian, Winda, dan yang tak bisa disebutkan satu persatu di Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Teman- teman angkatan 2006 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Terima kasih kepada pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Palembang yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan banyak membantu sampai selesainya skripsi ini.



12. Semua Rekan yang telah memberikan dorongan semangat dan saran-saran yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas ucapannya.

Akhirnya Penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian yang telah membantu penulis dengan tulus dan ikhlas. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTARAC	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Landasan Teori.....	8
1. Keuangan Daerah.....	8
a. Pengertian Keuangan Daerah.....	8
b. Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
2. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).....	12

3. Analisis Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Palembang.....	80
4. Analisis Rasio Keserasian Pemerintah Kota Palembang.....	83
5. Analisis <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR).....	85
6. Analisis Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Palembang.....	88
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Simpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Pemerintah Kota Palembang..... 1
Tabel II.1	Perkiraan Stuktur APBD berdasarkan PP No. 24/2005 Pemerintah Kabupaten/Kota... Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X0..... 19
Tabel III.1	Oprasional Variabel..... 44
Tabel IV.1	Rekap Realisasi APBD Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2005..... 66
Tabel IV.2	Rekap Realisasi APBD Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2006..... 70
Tabel IV.3	Rekap Realisasi APBD Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2007..... 71
Tabel IV.4	Rekap Realisasi APBD Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008..... 72
Tabel IV.5	Rekap Realisasi APBD Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2009..... 73
Tabel IV.6	Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2005-2009..... 75
Tabel IV.7	Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2005-2009..... 75
Tabel IV.8	Data Untuk Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2005-2009..... 78
Tabel IV.9	Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2005-2009..... 78

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1	Struktur Organisasi.....	55
-------------	--------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan selesai riset

2. Kartu Aktivitas Bimbingan

3. Sertifikat lulus ngaji Al-Qur'an

4. Pengesahan perbaikan skripsi

5. Biodata Penulis

ABSTRAK

Hendra Dewha Sastra / 22.2006.033 / 2011 / Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana kemampuan keuangan daerah kota Palembang pada tahun 2005-2009? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kemampuan keuangan daerah pemerintah kota Palembang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian deskriptif dengan tempat penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka No. 21 Palembang. Variabel penelitian adalah Kemampuan Keuangan Daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknis analisis data yang digunakan angka, table, dan uraian penjelasan .

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan *Rasio Keuangan*. Hal ini terlihat dalam tingkat kemandiriannya Pemerintah Kota Palembang masih membutuhkan dana dari pihak luar yaitu pemerintah pusat, selain itu disebabkan kurangnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah juga rendahnya tingkat efisien, sedangkan dalam tingkat efektivitas, keserasian,serta pertumbuhan Pemerintah Kota Palembang dapat dikatakan baik dikarenakan Pemerintah Kota Palembang jarang melakukan belanja rutin, sehingga Pemerintah Kota Palembang masih menggunakan dana yang ada, serta jarangya melakukan pinjaman terhadap pihak luar atau pemerintah pusat, dalam pertumbuhan juga terlihat baik, ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Pemerintah Kota Palembang yang telah mampu mengoptimalkan sumber pendapatannya baik yang telah ada maupun yang potensial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menghasilkan keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kata kunci: Kemampuan Keuangan Daerah

ABSTRACT

Hendra Dewha Sastra / 22.2006.033 / 2011 / Local Government Financial Capability Analysis of Palembang.

The formulation of the problem in writing this essay is how the financial ability of Palembang city area in the period of 2005-2009? The purpose of this study to determine the financial capacity of government located Palembang.

The research is descriptive research study with the research is Palembang City Regional Revenue Office which is located at Jl. Merdeka No. 21 Palembang. The variable is the ability of the regional financial research. The data used are secondary data. Data collection method used is the method of documentation. Analysis of the data used are qualitative and quantitative analysis. Technical analysis of the data used figures, tables, and descriptions of explanation.

Based on the results obtained by research and discussion, the Regional Financial Capability is calculated using Financial Ratios .. This can be seen in the level of independence of Palembang city government still needs funds from outside parties that the central government, other than that due to lack of local tax revenues and levies are also low levels of efficiency, whereas the level of effectiveness, harmony, and growth of Palembang city government to say whether Palembang City Government rarely perform routine expenditure, so that the Government of Palembang is still using existing funds, and rarely do outsiders or loans against the central government, the growth also looks good, it shows that the growth rate of Palembang city government has been able to optimize both revenue sources existing or potential. Thus it can be said that in a good financial management can result in the success of a region in running the government.

Keywords: Government Financial Capability

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah tingkat kota diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban ini biasa dipenuhi apabila pemerintah

daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Pemerintah Kota Palembang sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan. Kota Palembang sebagai salah satu daerah yang cukup maju, maka perlu untuk melakukan analisis rasio keuangan daerah mengingat keterbatasan pendapatan asli daerah tersebut dalam mengimbangi perolehan dana dari pemerintah pusat.

Berdasarkan data target dan realisasi APBD pemerintah Kota Palembang tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat dalam table I.1

Tabel I.1

Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Pemerintah Kota Palembang

Tahun Anggaran 2005 – 2009

Tahun Anggaran	Keterangan	Pendapatan Asli daerah	%	Total Pendapatan	%
2005	Realisasi	86.100.105.448,21	81,34%	625.094.188.304,87	97,50%
	Target	105.857.991.965,00		641.121.206.265,00	
2006	Realisasi	97.202.850.978,37	86,06%	893.987.722.886,53	97,32%
	Target	112.947.828.304,00		918.556.838.994,00	
2007	Realisasi	142.128.319.304,47	108,04%	1.168.721.295.856,05	107,74%
	Target	131.549.084.692,20		1.084.738.647.355,61	
2008	Realisasi	171.383.551.551,77	99,46%	1.209.505.934.544,41	110,51%
	Target	172.315.274.148,00		1.209.867.224.532,39	
2009	Realisasi	170.540.649.161,73	78,02%	1.219.171.711.299,20	91,20%
	Target	218.592.661.810,00		1.336.735.285.945,76	

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Tahun 2010

Data pada table I.1 di atas diperoleh gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kota Palembang masih berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2005 PAD sebesar Rp. 105.857.991.965,00 dan reasilasi PAD sebesar Rp. 86.100.105.448,21 dengan tingkat pencapaian 81,34%. Pada tahun 2006 target PAD sebesar Rp. 112.947.828.304,00 dan realisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp. 97.202.850.978,37 dengan tingkat pencapaian 86,06%. Pada tahun 2007 target PAD sebesar Rp. 131.549.084.692,20 dan realisasi PAD adalah sebesar Rp. 142.128.319.304,47 dengan tingkat pencapaian 108,04%. Pada tahun 2008 target PAD sebesar Rp.

172.315.274.148,00 dan realisasi PAD adalah sebesar Rp. 171.383.551.551,77 dengan tingkat pencapaian 99,46%. Pada tahun 2009 target PAD sebesar Rp. 218.592.661.810,00 dan realisasi PAD adalah sebesar Rp. 170.540.649.161,73 dengan tingkat pencapaian 78,02%.

Pada tabel I.1 diperoleh gambaran mengenai total pendapatan daerah Kota Palembang yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 2005 target total pendapatan daerah sebesar Rp. 642.121.206.265,00 dan realisasi total pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 625.094.188.304,87 dengan tingkat pencapaian 97,50%. Pada tahun 2006 target total pendapatan daerah sebesar Rp. 918.556.838.994,00 dan realisasi total pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 893.987.722.886,53 dengan tingkat pencapaian 97,32%. Pada tahun 2007 target total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.084.738.647.355,61 dan realisasi total pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 1.168.721.295.856,05 dengan tingkat pencapaian 107,74%. Pada tahun 2008 target total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.209.867.224.532,39 dan realisasi total pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 1.209.505.934.544,41 dengan tingkat pencapaian 110,51%. Pada tahun 2009 target total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.336.735.285.945,76 dan realisasi total pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 1.219.171.711.299,20 dengan tingkat pencapaian 91,20%.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kemampuan daerah tersebut sehingga penulis mengambil judul **“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat tersebut maka yang menjadi masalah yang ingin penulis jawab yaitu mengenai “ Bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2005-2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2005-2009.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang analisis kemampuan keuangan terhadap sektor publik.

2. Bagi Kota Palembang

Dapat berguna sebagai bahan masukkan dalam menganalisis kemampuan keuangan terhadap sektor publik Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Sebagai pengetahuan dan dijadikan bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fajar ferdianto (2007) dengan judul Penerapan rasio sebagai dasar penilaian kinerja keuangan pada pemerintah Kota Prabumulih. Perumusan masalah dalam tersebut adalah penerapan rasio sebagai dasar penilaian kinerja keuangan pada pemerintah Kota Prabumulih dapat diterapkan bila diukur dengan rasio keuangan. Tujuannya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan serta sejauh mana aktivitas pemerintah daerahnya bila diukur dengan rasio keuangan.

Penggunaan rasio keuangan dalam penelitian tersebut adalah rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan. Indikator analisa rasio kemandirian yaitu membandingkan PAD dengan total pendapatan. Indikator analisa rasio efektivitas yaitu membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD pada periode yang telah ditentukan. Indikator analisa rasio efisiensi yaitu membandingkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi dari penerimaan. Indikator analisa rasio keserasian yaitu membandingkan total belanja rutin dengan total APBD tahun yang bersangkutan. Analisa *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yaitu merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian

daerah lainnya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Indikator Analisa rasio pertumbuhan yaitu mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Kesimpulan dari hasil penelitian sebelumnya adalah terjadinya tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam pemerintah Kota Prabumulih. Kinerja yang diukur dengan rasio keuangan menghasilkan bahwa dalam pemerintahan Kota Prabumulih cukup banyak perkembangan, baik dari segi pelayanan, perkembangan maupun kesejahteraan masyarakat yang secara berkesinambungan. Sehingga pemerintahan kota Prabumulih dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dinyatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menerapkan rasio sebagai dasar penilaian kinerja pada pemerintah Kota Prabumulih, sedangkan penelitian sekarang menerapkan rasio untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan rasio keuangan.



B. Landasan Teori

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam buku Abdul Halim (2004:18) Keuangan daerah dapat diartikan sebagai: “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku”.

Dari pengertian keuangan daerah di atas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- 1). Dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- 2). Dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang didasari oleh UU Nomor 17 Tahun 2003, tugas pengelolaan keuangan daerah :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD.
- 2) Menyusun rancangan dan perubahan APBD.
- 3) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.
- 4) Melaksanakan fungsi bendahara umum.
- 5) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah.

b Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi fiskal. Tiga bentuk pertanggungjawaban pengelolaan (manajemen) keuangan daerah jika dilihat dari aspek kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal keuangan daerah, yaitu :

- 1) Pertanggungjawaban dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi;
- 2) Pertanggungjawaban dalam kerangka tugas perbantuan;

3) Pertanggungjawaban dalam kerangka tugas dekonsentrasi.

Berdasarkan ketentuan DPR-RI dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pencatatan atau pembukuan serta pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, semua bentuk atau jenis penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam kerangka tugas desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

Penilaian atas pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pemerintah daerah menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Laporan pertanggungjawaban kepada seluruh pengelolaan keuangan daerah penerimaan dan pengeluaran atas APBD.
- 2) Pertanggungjawaban atas kinerja keuangan daerah (*budget performing*) dari sisi efisiensi dan efektivitas.

Pertanggungjawaban APBD dari sisi efisiensi dan efektivitas adalah bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara efisien. Dari segi pendapatan atau penerimaan, efisien berarti bahwa dalam upaya memperoleh setiap pendapatan daerah, beban biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaannya. Dari segi pengeluaran atau belanja, efektif artinya segala jenis pengeluaran dalam anggaran harus mampu menghasilkan manfaat langsung dan tepat sasaran

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

Sedangkan pertanggungjawaban laporan arus kas dilakukan sesuai dengan banyaknya jumlah transaksi masuk dan keluarnya kas. Sementara neraca daerah merupakan jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD yang sebagian besar merupakan catatan atau informasi tentang perkembangan aset-aset daerah di luar APBD. Sebab ada aset atau kekayaan milik daerah di luar APBD seperti aset-aset milik BUMD, tanah milik daerah, barang-barang inventaris daerah, dan aset pemerintah daerah lainnya yang sah.

2. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemda, di mana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran, yang dimaksud Mamesah dalam buku Abdul Halim (2004:20) APBD adalah suatu anggaran.

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan merupakan target minimal guna untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, biayanya satu tahun.

a. Penyusunan APBD

APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Selain itu APBD juga merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/2477/SJ Tanggal 5 Desember 2001 menyebutkan bahwa proses penyusunan APBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Proses Penentuan Rencana Plafon APBD

- a) Bagian keuangan, Dinas Pendapatan Propinsi, dan dinas-dinas yang mengurus sumber penerimaan daerah secara bersama-sama

memperkirakan target anggaran pendapatan rutin dan pendapatan pembangunan.

- b) Bagian Penentuan Rencana Plafon Anggaran Belanja Rutin diperoleh dinas/instansi/unit satuan kerja/lembaga daerah yang didasarkan kepada Surat Edaran Kepala Daerah.
 - c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi, Bagian Keuangan, dan Bagian Penulisan Program secara bersama menentukan rencana anggaran pembangunan berdasarkan skala prioritas program dan proyek dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun daerah (Repelitada). Secara teknis, dapat dijelaskan bahwa dalam penentuan plafon didasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya dan melihat anggaran tahun berjalan dengan ditambah peningkatan sebesar kurang lebih 30%.
- 2). Proses Penentuan Proyek-Proyek Pembangunan
- a) Dinas/Lembaga Propinsi menyusun dan mengajukan perencanaan fisik dan perincian pembiayaan proyek yang akan dilaksanakan.
 - b) Bappeda Propinsi mengadakan penelitian tentang proyek berdasarkan skala prioritas Repelitsda.
 - c) Bagian Keuangan dan Bagian Penulisan Program mengadakan penelitian jumlah biaya.

3). Proses Penentuan Belanja Rutin

a) Penentuan Belanja dan Gaji Pensiun

Anggaran belanja untuk gaji, biaya pensiun, dan tunjangan lainnya direncanakan oleh Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian, Dinas/Lembaga Propinsi didasarkan oleh Surat Keputusan Kepegawaian.

b) Penentuan Belanja Non Pegawai dalam anggaran rutin dilakukan sebagai berikut:

- 1) Lembaga/Dinas daerah menyusun dan merencanakan usulan kegiatan beserta pembiayaannya.
- 2) Bagian Keuangan mengadakan penelitian dan penentuan prioritas.

Hasil rencana anggaran yang telah disusun secara terpadu oleh Bagian Keuangan, Bagian Penulisan Program, dan Bappeda Kabupaten/Kota selanjutnya diajukan ke Kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan dan kemudian disampaikan kepada DPRD sebagai APBD guna pembahasan dan persetujuan DPRD serta untuk penetapannya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

b. Proses Penetapan APBD

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan APBD (RAPBD) kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Bila RAPBD tidak disetujui DPRD, pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan RAPBD tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD. Apabila



(1) Pandangan umum dalam Rapat Paripurna oleh para anggota yang membawa suara fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Jawaban kepala daerah dalam Rapat Paripurna terhadap pandangan umum para anggota.

b) Bila Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD:

(1) Pendapat kepala daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi/Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD dalam Rapat Paripurna terhadap pendapat kepala daerah.

3) Tahap III

Pembahasan dalam Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

4) Tahap IV, meliputi:

a Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:

(1) Laporan hasil pembicaraan tahap III.

(2) Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.

b Pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Propinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi

Daerah paling lambat 15 hari setelah ditetapkan. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat 15 hari setelah ditetapkan.

c Struktur APBD

Struktur APBD yang digunakan di dalam penyusunan APBD yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110/1998 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000, yaitu bahwa anggaran daerah disusun menurut bentuk A.I yang terdiri dari :

- 1) Bab I, mengenai Pandapatan
- 2) Bab II, mengenai belanja yang terdiri dari :
 - a) Belanja Rutin;
 - b) Belanja Pembangunan.
- 3) Ringkasan pendapatan dan belanja yang terdiri dari :
 - a) Lampiran A/1 – Ringkasan Pendapatan;
 - b) Lampiran A/2 – Ringkasan Belanja Rutin;
 - c) Lampiran A/2/P – Ringkasan Belanja pembangunan;
 - d) Lampiran A/1/UKP – Ringkasan Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan;
 - e) Lampiran A/2/UKP – Ringkasan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan.

Struktur APBD yang baru didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, dan PP Nomor 24 Tahun 2005. Berikut gambar struktur APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 :

Tabel II.2

**Perkiraan Stuktur APBD berdasarkan PP No. 24/2005
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 20X0**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<u>PENDAPATAN</u>			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx
8				
9	PENDAPATAN TRANSFER			
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
11	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx
12	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx
13	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx
14	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	xxx	xxx	xx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx
16				
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA			
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx

21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah pusat (15 + 20)	XXXX	XXXX	XX
22				
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX	XX
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX	XX
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (24 s/d 25)	XXXX	XXXX	XX
27	Total Pendapatan Transfer (21 s/d 26)	XXXX	XXXX	XX
28				
29	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH			
30	Pendapatan Hibah	XXX	XXX	XX
31	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX	XX
32	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX	XX
33	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (30 s/d 32)	XXXX	XXXX	XX
34				
35	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)	XXXX	XXXX	XX
36				
37	<u>BELANJA</u>			
38	BELANJA OPERASI			
39	Belanja Pegawai	XXX	XXX	XX
40	Belanja Barang dan Jasa	XXX	XXX	XX
41	Bunga Subsidi	XXX	XXX	XX
42	Bantuan Sosial	XXX	XXX	XX
43	Hibah	XXX	XXX	XX
44	Jumlah Belanja Operasi (39 s/d 43)	XXXX	XXXX	XX
45				
46	BELANJA MODAL			
47	Belanja Tanah	XXX	XXX	XX
48	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX	XX
49	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX	XX
50	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	XXX	XXX	XX
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX	XX
52	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX
53	Jumlah Belanja Modal (47 s/d 52)	XXXX	XXXX	XX
54				



55	BELANJA TAK TERSANGKA			
56	Belanja Tak Tersangka	XXX	XXX	XX
57	Jumlah Belanja Tak Tersangka	XXX	XXX	XX
58	Jumlah Belanja (44 + 53 + 57)	XXXX	XXXX	XX
59				
60	<u>TRANSFER</u>			
61	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA			
62	Bagi Hasil Pajak Ke Desa	XXX	XXX	XX
63	Bagi Hasil Retribusi Ke Desa	XXX	XXX	XX
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Ke Desa	XXX	XXX	XX
65	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa (62 s/d 64)	XXX	XXX	XX
66	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (58 + 65)	XXX	XXX	XX
67				
68	SURPLUS/DEFISIT (35 + 66)	XXXX	XXXX	XX
69				
70	<u>PEMBIAYAAN</u>			
71				
72	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
73	Penggunaan SILPA	XXX	XXX	XX
74	Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	XXX	XXX	XX
75	Pinjaman Aset Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX	XX
76	Penjualan Investasi Lainnya	XXX	XXX	XX
77	Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX	XX
78	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	XXX	XXX	XX
79	Pinjaman Dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya	XXX	XXX	XX
80	Pinjaman Dari BUMN/BUMD	XXX	XXX	XX
81	Pinjaman Dari Bank/Lembaga Keuangan	XXX	XXX	XX
82	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX	XX
83	Jumlah Penerimaan (73 s/d 82)	XXXX	XXXX	XX
84				
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
86	Pemberian Pinjaman Jangka Panjang	XXX	XXX	XX
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX	XX
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah pusat	XXX	XXX	XX

89	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemda Otonom Lainnya	xxx	xxx	xx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMN/BUMD	xxx	xxx	xx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	xxx	xxx	xx
92	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx	xx
93	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx
94	Jumlah Pengeluaran (86 s/d 93)	xxx	xxx	xx
95	PEMBIAYAAN NETTO (83 – 94)	xxxx	xxxx	xx
96				
97	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (68 – 95)		xxx	

Sumber: Abdul Halim. 2007

d Klasifikasi Pendapatan Dalam APBD

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan dalam anggaran daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (DPR-RI,2004). Kelompok PAD terdiri dari :

a) Menurut Halim (2004:67-168) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

terdiri dari:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (4) Pajak Kendaraan di Atas Air;
- (5) Pajak Air di Bawah Tanah;

- (6) Pajak Air Permukaan;
- (7) Pajak Hotel;
- (8) Pajak Restoran;
- (9) Pajak Hiburan;
- (10) Pajak Reklame;
- (11) Pajak Penerangan Jalan;
- (12) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- (13) Pajak Parkir.

b) Retribusi Daerah, terdiri dari:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- (3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak;
- (4) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

c) Bagian Usaha Laba Daerah

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- (1) Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah;
- (2) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank;
- (3) Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank;
- (4) Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi.

d) Lain-lain PAD

Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain PAD menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 meliputi :

- (1) Hasil Penjualan kekayaan milik daerah yang tidak dipisahkan;
- (2) Penerimaan jasa giro;
- (3) Pendapatan bunga;
- (4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibedakan menjadi :

a) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil ini bersumber dari :

- (1) Pajak, terdiri dari :
 - (a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - (b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),dan;

(c) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21.

(2) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Terdiri dari :

- (a) Kehutanan;
- (b) Pertambangan Umum;
- (c) Perikanan;
- (d) Pertambangan minyak bumi;
- (e) Pertambangan gas bumi, dan;
- (f) Pertambangan panas bumi.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3) Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang

sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan ini terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

e. Klasifikasi Belanja Dalam APBD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang ditetapkan DPR-RI, disebutkan bahwa belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Secara garis besar belanja daerah dibagi menjadi dua macam, yaitu (Halim,2004:70-74) :

1) Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik dan bersifat periodik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri dari 2 Jenis Belanja, yaitu :

a) Belanja Pegawai/Personalia

Belanja pegawai merupakan belanja pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. Jenis

belanja pegawai/personalia untuk bagian belanja aparatur daerah meliputi objek belanja :

- (1) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Gaji dan Tunjangan Pegawai;
- (3) Biaya Perawatan dan Pengobatan;
- (4) Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa. Jenis belanja dan jasa untuk bagian belanja aparatur daerah terdiri atas objek belanja berikut:

- (1) Biaya Bahan Pakai Habis Kantor;
- (2) Biaya Jasa Kantor;
- (3) Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor;
- (4) Biaya Sewa Kantor ;
- (5) Biaya Makanan dan Minuman Kantor;
- (6) Biaya Pakaian Dinas;
- (7) Biaya Bunga Utang;
- (8) Biaya Depresiasi Gedung;
- (9) Biaya Depresiasi Alat Angkutan;
- (10) Biaya Depresiasi Alat kantor dan Rumah Tangga;
- (11) Biaya Depresiasi Alat Studio dan Alat Komunikasi.

Selanjutnya jenis belanja untuk bagian belanja pelayanan publik terdiri atas objek belanja berikut ini:

- (1) Biaya Bahan Pakai Habis Kantor;
- (2) Biaya Jasa Kantor;
- (3) Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor;
- (4) Biaya Sewa Kantor;
- (5) Biaya Makanan dan Minuman Kantor;
- (6) Biaya Pakaian Dinas;
- (7) Biaya Bunga Utang;
- (8) Biaya Depresiasi Gedung;
- (9) Biaya Depresiasi Alat-alat Besar;
- (10) Biaya Depresiasi Alat Angkutan;
- (11) Biaya Depresiasi Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- (12) Biaya Depresiasi Alat Pertanian;
- (13) Biaya Depresiasi Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- (14) Biaya Depresiasi Studio dan Alat Komunikasi;
- (15) Biaya Depresiasi Alat Kedokteran;
- (16) Biaya Depresiasi Alat-alat Laboratorium.

c) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas merupakan jenis belanja pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan. Objek belanja dari jenis belanja ini untuk bagian belanja aparatur daerah meliputi biaya perjalanan dinas, sedangkan untuk bagian belanja pelayanan publik

meliputi biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan pindah, dan biaya pemulangan pegawai yang gugur dan dipensiunkan

d) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan merupakan belanja pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah. Objek belanja dari jenis belanja ini untuk bagian belanja daerah terdiri atas :

- (1) Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung;
- (2) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan;
- (3) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga;
- (4) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi;
- (5) Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan;
- (6) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan.

Selanjutnya objek belanja dari jenis belanja ini untuk bagian belanja pelayanan publik terdiri atas :

- (1) Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- (2) Biaya Pemeliharaan Bangunan Air (Irigasi);
- (3) Biaya Pemeliharaan Instalasi;
- (4) Biaya Pemeliharaan Jaringan;
- (5) Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung;
- (6) Biaya Pemeliharaan Monumen;
- (7) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar;
- (8) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan;
- (9) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Pertanian;



- (10) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga;
- (11) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi;
- (12) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran;
- (13) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium;
- (14) Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan;
- (15) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Bengkel;
- (16) Biaya Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan;
- (17) Biaya Pemeliharaan Hewan Ternak serta Tanaman;
- (18) Biaya Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan.

2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Kelompok belanja ini merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi jenis belanja :

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personel yang berhubungan dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel. Belanja pegawai/personalia untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik meliputi objek belanja berikut :

(1) Honorarium

Honorarium merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran honor personel atau orang yang secara langsung

melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Contohnya honor bulanan, honor harian, dan honor proyek

(2) Upah Lembur

Upah lembur pengeluaran untuk pemberian upah pada pegawai karena bekerja diluar jam kerja

(3) Insentif

Insentif merupakan pengeluaran guna pemberian uang perangsang atau insentif untuk orang atau personel yang bekerja untuk suatu kegiatan

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Jenis belanja barang dan jasa baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik meliputi objek belanja:

- (1) Biaya Bahan/Material;
- (2) Biaya Jasa Pihak Ketiga;
- (3) Biaya Cetak dan Penggandaan;
- (4) Biaya Sewa;
- (5) Biaya Makanan dan Minuman;
- (6) Biaya Bunga Utang;
- (7) Biaya Pakaian Kerja.

c) Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Biaya ini meliputi biaya perjalanan dinas dalam daerah atau luar daerah

d) Belanja Pemeliharaan

Merupakan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan barang daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik

3) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja berikut, baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik :

- 1) Biaya Modal Tanah;
- 2) Biaya Modal Jalan dan Jembatan;
- 3) Biaya Bangunan Air (Irigasi);
- 4) Biaya Modal Instalasi;
- 5) Biaya Modal Jaringan;
- 6) Biaya Modal Bangunan Gedung;
- 7) Biaya Modal Monumen;
- 8) Biaya Moadal Alat-alat Besar;
- 9) Biaya Moadal Alat-alat Angkutan;

- 10) Biaya Modal Alat-alat Pertanian;
 - 11) Biaya Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - 12) Biaya Modal Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi;
 - 13) Biaya Modal Alat-alat Kedokteran;
 - 14) Biaya Modal Alat-alat Laboratorium;
 - 15) Biaya Modal Buku/Perpustakaan;
 - 16) Biaya Modal Alat-alat Bengkel;
 - 17) Biaya Modal Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan;
 - 18) Biaya Modal Hewan Ternak serta Tanaman;
 - 19) Biaya Modal Alat-alat Persenjataan;
- 4) Belanja bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan berbentuk kegiatan pengalihan uang dan atau barang dari pemerintah daerah. Kelompok ini terdiri atas jenis belanja berikut :
- a) Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Bagi Propinsi);
 - b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa (Bagi Kabupaten/Kota);
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Bagi Propinsi);
 - d) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan (Bagi Kabupaten/Kota);
 - e) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan;

f) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi.

5) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja pemerintah daerah untuk pelayanan publik dalam rangka mengatasi bencana alam dan atau bencana sosial

f. Klasifikasi Pembiayaan Dalam APBD

Menurut Halim (2004:74-76) Secara garis besar pembiayaan dibagi atas dua kelompok yaitu penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kelompok Penerimaan daerah terdiri atas jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri atas pembiayaan transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Berikut uraian dari pembiayaan di atas :

1) Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah adalah sumber pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran, namun belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Kelompok Pembiayaan daerah terdiri atas Jenis Pembiayaan Berikut :

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu yang dapat berasal dari proyek yang belum selesai pada

tahun anggaran yang lalu dan dilanjutkan pada tahun anggaran berjalan .

b) Transfer dari Dana Cadangan

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari kegiatan transfer sumber-sumber ekonomi dari pemilik.

c) Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari meminjam dana dan menerbitkan obligasi.

d) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

Merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari penjualan aktiva tetap milik Pemerintah Daerah.

2) Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk mengalokasikan surplus anggaran. Kelompok pembiayaan pengeluaran daerah terdiri atas jenis pembiayaan berikut :

a) Transfer Ke Dana Cadangan

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan transfer sumber-sumber ekonomi kepada pemilik.

b) Penyertaan Modal

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa kegiatan penyertaan modal (investasi).



c) Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa pelunasan utang pokok yang telah jatuh tempo.

d) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Merupakan sumber pembiayaan yang berupa sisa anggaran tahun berjalan yang dapat berasal dari surplus anggaran tahun berjalan.

3. Analisis Rasio Keuangan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Depdiknas,2006:43) kata analisis didefinisikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Analisis keuangan bertujuan untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam laporan keuangan yang dapat menyebabkan masalah-masalah di masa yang akan datang dan juga untuk menentukan keunggulan-unggulan yang dapat diandalkan

Rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena dapat dipergunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan penting yang berkaitan dengan kesehatan keuangan suatu badan usaha. Menurut Imawardi (2006:2) rasio keuangan adalah cara analisis yang menggunakan perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan oleh laporan keuangan suatu perusahaan atau instansi.

a. Analisis Rasio Keuangan Pada Perusahaan Swasta

Secara matematis, rasio keuangan hanya sebuah rasio yang angka penyebut dan pembilangnya terdiri dari data keuangan. Tujuan penggunaan rasio dalam analisis laporan keuangan adalah menstandarkan informasi yang dianalisis sehingga dapat dibuat perbandingan rasio dari perusahaan yang berbeda atau mungkin dalam perusahaan yang sama pada periode waktu yang berlainan. Jadi, rasio keuangan merupakan upaya menstandarisasi informasi keuangan sehingga menghasilkan perbandingan yang berguna.

Menurut Halim (2004:149) Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial) analisis rasio keuangan umumnya terdiri dari :

- 1) Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera.
- 2) Rasio *Leverage* yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditor.
- 3) Rasio Aktivitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif tidaknya perusahaan di dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.
- 4) Rasio Profitabilitas yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Menurut Halim (2004:149-150) Rasio-rasio tersebut disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu :

- 1) Para kreditor baik jangka pendek dan jangka panjang, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Pemegang saham ataupun perusahaan, yaitu untuk menganalisis sampai jauh mana perusahaan mampu membayar dividen ataupun memperoleh laba.
- 3) Pengelolaan, yaitu sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

b. Analisa rasio keuangan pada APBD

Penggunaan analisis rasio rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya.

Berikut ini beberapa analisa yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, antara lain :

1) Analisis rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap dana pusat dan tingkat partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap bantuan dana pusat atau semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Rasio kemandirian ini dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total APBD:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

2) Analisis Rasio Efektivitas

Analisis ini di gunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran. Analisis ini diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah pada periode yang ditentukan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Target penerimaan PAD yg ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

3) Analisis Rasio Efisiensi

Analisis ini diperoleh dengan membandingkan dengan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi dari penerimaan pendapatan daerah itu sendiri.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

4) Analisis Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tingginya persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio belanja rutin dapat diperoleh dengan membandingkan total belanja rutin dengan total APBD tahun yang bersangkutan.

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja rutin} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$$

Sedangkan rasio belanja pembangunan dapat diperoleh dengan membandingkan total belanja pembangunan dengan total APBD tahun yang bersangkutan.

$$\text{Rasio belanja Pembangun Terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja pembangunan} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$$

5) Analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga dapat menggunakan alternative sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketentuan itu adalah:

(a) Ketentuan yang menyangkut persyaratan

(1) Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.

(2) *Debt Service Coverage Ratio* minimal 2,5

Debt Service Coverage Ratio ini dapat diperoleh dengan menghitung penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah, dan Dana Alokasi Umum dikurang dengan belanja wajib, yang kemudian dibandingkan dengan total dari penjumlahan pokok angsuran, bunga, dan biaya pinjaman.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (pokok angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan : PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

(b) Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman

(1) Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dari pelayanan masyarakat.

(2) Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas

(c) Ketentuan yang menyangkut prosedur

(1) Mendapat persetujuan DPRD

(2) Dituangkan dalam kontrak

6) Analisis Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2003:11), jenis penelitian ini di kelompokkan menjadi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan variable penelitian merupakan variable mandiri tetapi untuk sample yang lebih darisatu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.



B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21.

C. Operasional Variabel

Tabel III.1
Operasional Variabel

Variabel	Devinisi	Indikator
Kemampuan keuangan daerah	Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Palembang Tahun 2005-2009	Rasio Keuangan : 1. Rasio kemandirian 2. Rasio Efektivitas 3. Rasio Efisiensi 4. Rasio keserasian 5. <i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i> 6. Rasio Pertumbuhan

Sumber: Penulis 2010

D. Data yang diperlukan

Menurut M. Iqbal, (2003:33), menyatakan bahwa data yang ditinjau dari cara memperolehnya yaitu :

1. Data primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian laporan baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari :

- a. Sejarah singkat Kota Palembang
- b. Struktur Organisasi Kota Palembang
- c. Data target dan Realisasi Pendapatan Kota Palembang 2005 – 2009

E. Teknik pengumpulan data

Menurut Sugiono (2003:129), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (Observasi) yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.

2. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi.

3. Angket (Kuesioner)

Angket Kuesioner yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan penyelidikan melalui sumber dokumen baik yang terjadi di masa lampau atau di masa sekarang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dimana teknik dokumentasi adalah dengan cara meminta data historis pendapatan daerah yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sehingga sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Analisis data dan teknik analisis

Menurut M. Iqbal (2003:32), teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 cara yaitu :

1. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan atau tidak dalam bentuk angka

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu data yang berbentuk bilangan atau dalam bentuk angka-angka.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kuantitatif dan Kualitatif. Dimana analisis kuantitatif menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan) maupun keuangan yang bersumber dari APBD pemerintah kota Palembang Tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009. Sedangkan analisis kualitatif untuk menganalisis angka-

angka hasil perhitungan dengan menggunakan teori yang sesuai masalah yang akan dibahas dalam analisis kuantitatif.

Analisis kemampuan daerah ini dilakukan dengan menggunakan rasio yang berupa :

a. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah

dengan total APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Analisis ini digunakan untuk membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah

pada periode yang telah ditentukan. Analisis ini berguna untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan yang diperoleh.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD yg diperoleh}}{\text{Target penerimaan PAD yg ditetapkan berdasarkan potensi ril}}$$

b. Analisis rasio efektivitas

Analisis ini digunakan untuk membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pada periode yang telah ditentukan. Analisis ini berguna untuk mengetahui keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan yang diperoleh.

angka hasil perhitungan dengan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam analisis kuantitatif.

Analisis kemampuan daerah ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio yang berupa :

a. Analisis rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

b. Analisis rasio efektivitas

Analisis ini digunakan untuk membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah pada periode yang telah ditentukan. Analisis ini berguna untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang diperoleh.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Target penerimaan PAD yg ditetapkan berdasarkan potensi riil}}$$

c. Analisis rasio efisiensi

Analisis ini diperoleh dengan membandingkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi dari penerimaan pendapatan asli daerah itu sendiri.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Apabila biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah tidak tercantum dalam APBD maka biaya tersebut ditetapkan sebesar 5% per bulannya dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{(\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah}) \times (5\% \times 12 \text{ bln})}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

d. Analisis rasio keserasian

Rasio belanja rutin diperoleh dengan membandingkan total belanja rutin dengan total APBD tahun yang bersangkutan.

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja rutin} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$$

Sedangkan rasio belanja pembangunan diperoleh dengan membandingkan total belanja pembangunan dengan total APBD tahun bersangkutan.

$$\text{Rasio belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja pembangunan} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$$

e. Analisis *Debt Service Coverage (DSCR)*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternative sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut meliputi :

1) Ketentuan yang meyangkut persyaratan :

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan Sumber Daya Alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya yang jatuh tempo.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (pokok angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

2) Ketentuan yang meyangkut penggunaan pinjaman

3) Ketentuan yang meyangkut prosedur

f. Analisis rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya

pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Palembang

Kota Palembang didirikan pada tahun 605 Shaka (atau 683 masehi) oleh Dapunta Iyang. Kelahiran dan perkembangan Kota Palembang pada dasarnya sejalan dengan lahir dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya. Pada masa Kerajaan Sriwijaya nama Palembang belum dikenal, tetapi lokasi pusat Kerajaan Sriwijaya adalah bertempat dengan letak Kota Palembang sekarang. Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya barulah nama Palembang dikenal dengan “ Palimpong “, sebagai mana tersebut dalam tulisan Cina Chufanshi. Selain itu juga dapat dilihat dari tulisan Wanglayuan yang berjudul Toaichilio (tahun 1349/1350) yang juga menyebutkan “ Palimpong “ untuk Kota Palembang. Dilihat dari sejarah ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kota Palembang sudah ada sejak sekitar pertengahan abad ke-14 dan ketika itu telah merupakan sebuah kota besar.

Secara Geografis Kota Palembang terletak pada $104^{\circ}37''$ - $104^{\circ}52''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}52''$ - $3^{\circ}53''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 12 Meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kota Palembang adalah 400,61 Km² atau 40.061 Ha. Batas wilayah Kota Palembang sebelah Timur dan Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Sebelah



- 2) Bagian Kesatuan Bangsa:
 - a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa;
 - b) Sub Bagian Demokratisasi;
 - c) Sub Bagian penanganan masalah Aktual;
 - 3) Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan, Kajian Hukum dan Dokumentasi Hukum;
 - b) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum;
 - c) Sub Bagian kelembagaan, Analisa dan Formasi jabatan;
 - d) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 - 4) Bagian Hubungan Masyarakat:
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan.
- e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- 1) Bagian Perekonomian:
 - a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Daerah;
 - b) Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - c) Sub Bagian Pertanian;
 - d) Sub Bagian Pembinaan Perusahaan di Daerah.
 - 2) Bagian Pembangunan:
 - a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - c) Sub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan.

3) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan:

- a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan;
- b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga
- c) Sub Bagian Agama;
- d) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerja;
- e) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.

f. Asisten Administrasi

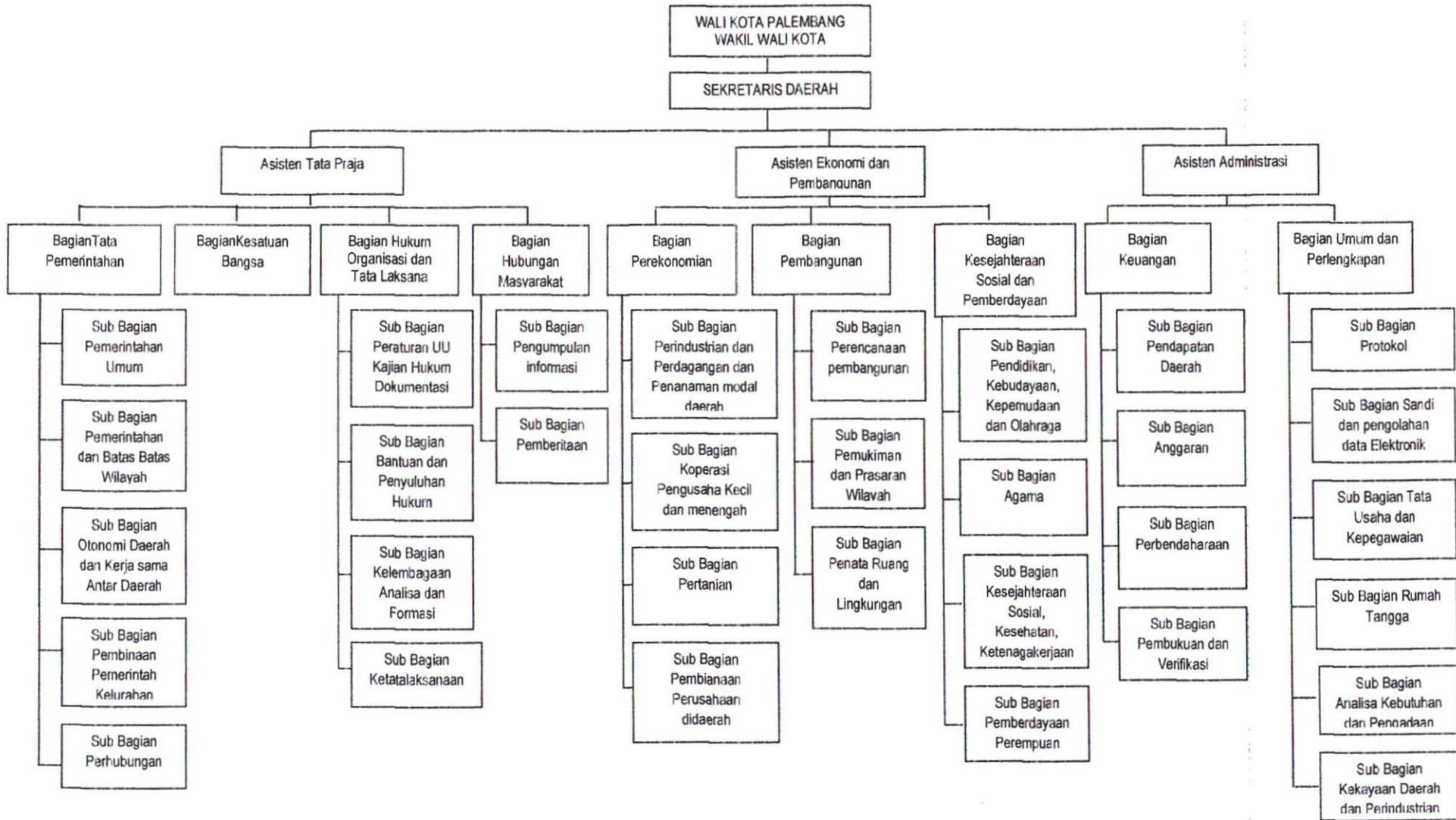
1) Bagian Keuangan:

- a) Sub Bagian Anggaran ;
- b) Sub Bagian Pendapatan Daerah dan Verifikasi;
- c) Sub Bagian Pembendaharaan;
- d) Sub Bagian Pembukuan.

2) Bagian Umum dan Perlengkapan:

- a) Sub Bagian Protokol;
- b) Sub Bagian Rumah Tangga;
- c) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
- d) Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Perindustrian;
- e) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- f) Sub Bagian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang



Sumber : Pemerintah Kota Palembang Tahun 2010

3. Pembagian Tugas Pemerintah Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang, terdiri dari :

a. Kepala Daerah

1). Tugas Kepala Daerah

Kepala Daerah Mempunyai tugas Memimpin suatu daerah dan membangun daerah demi penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah.

2). Fungsi Kepala Daerah

- a) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- b) Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya.

b. Wakil Kepala Daerah

1) Tugas Wakil Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membangun daerah.

2) Fungsi Wakil Kepala Daerah

- a) Mengkoordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah.
- b) Mengkoordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda.

- c) Mengkoordinasi upaya pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Sekretariat Daerah

1) Tugas Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah (tugas pokok).

2) Fungsi Sekretariat Daerah

- a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.
- b) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah.
- c) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah daerah.

d. Asisten Tata Praja

1) Tugas Asisten Tata Praja

Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, perhubungan, komunikasi serta perumusan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Asisten Tata Praja

- a) Merumuskan bahan kebijakan, penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan komunikasi.



- b) Melakukan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, kesatuan bangsa dan komunikasi.
- c) Menyusun bahan kebijakan dan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan.

Asisten Tata Praja terdiri dari :

- a) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi Pembina penyelenggaraan pemerintahan ke kelurahan.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan :

- (1) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum.
- (2) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan keagrariaan.
- (3) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan pemerintah kelurahan.

Bagian Tata Pemerintahan ini terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- (2) Sub Bagian Keagrarian dan Batas Wilayah;
- (3) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah;
- (4) Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan;
- (5) Sub Bagian Perhubungan.

b) Bagian Kesatuan Bangsa

Bagian Kesatuan Bangsa mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memonitor penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa.

Fungsi Bagian Kesatuan Bangsa

- (1) Mempersiapkan bahan kebijakan dalam koordinasi dan monitoring penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa.
- (2) Pemantapan integrasi bangsa dan perkembangan politik.
- (3) Penanganan masalah aktual kemasyarakatan, demokratisasi dan HAM, serta pembantuan pelaksanaan pemilihan umum.

Bagian Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Kesatuan Bangsa;
- (2) Sub Bagian Demokratisasi;
- (3) Sub Bagian Penanganan Masalah Aktual.

c) Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan penyelenggaraan perumusan perundang-undangan dan pengkajian hukum, memberikan bantuan dan penyuluhan.

Fungsi Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana :

- (1) Mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan daerah, keputusan

kepala daerah, produk-produk hukum dan pengkajian hukum.

- (2) Menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintahan daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta memberikan penyuluhan hukum.
- (3) Menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi dan dokumentasi hukum serta mengelola perpustakaan.
- (4) Mengelola data, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan teknis penataan kelembagaan.
- (5) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang menghimpun tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja.
- (6) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendayagunaan aparatur Negara.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Kajian Hukum dan Dokumentasi Hukum;
- (2) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum;
- (3) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Jabatan;
- (4) Sub Bagian Ketatalaksanaan.

d) Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan pembinaan Pemerintah Daerah.

Fungsi Hubungan Masyarakat, yaitu :

- (1) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.
- (2) Melaksanakan hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah.
- (3) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
- (2) Sub Bagian Pemberitaan.

e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

1) Tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan pelaksanaan pembangunan/perekonomian, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan perempuan.

2) Fungsi Asisten Ekonomi dan Pembangunan

- a) Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan daerah, bangunan antar daerah dan antar sektor.
- b) Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perekonomian.
- c) Mengkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

a) Bagian Perekonomian

Bagian perekonomian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan bidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi.

Fungsi-fungsi bagian perekonomian :

- (1) Penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan di bidang industri dan perdagangan, pasar dan statistik serta pembinaan modal daerah.
- (2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- (3) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan.

- (4) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang perusahaan daerah dan perbankan daerah.

Bagian ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Daerah;
- (2) Sub Bagian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- (3) Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah.

b) Bagian Pembangunan

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian pembangunan.

Fungsi-fungsi Bagian Pembangunan terdiri dari :

- (1) Melakukan koordinasi dan penyusunan pembangunan daerah.
- (2) Melakukan koordinasi dan penyusunan pembangunan pemukiman dan prasarana wilayah.
- (3) Melakukan koordinasi dan penyusunan-penyusunan ruang dan lingkungan.
- (4) Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Bagian Pembangunan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan;
- (2) Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- (3) Sub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan.



c) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

Tugas bagian ini melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan teknis pembinaan serta memantau perkembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan.

Fungsi-fungsi Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- (1) Pembinaan di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- (3) Koordinasi pembinaan urusan agama.
- (4) Pembinaan urusan kesehatan, ketenagakerjaan, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga;
- (2) Sub Bagian Agama;
- (3) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan;
- (4) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.

f. Asisten Administrasi

1) Tugas Asisten Administrasi

Asisten administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi, pembinaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, dan rumah tangga.

2) Fungsi Asisten Administrasi

a) Melakukan koordinasi penyusunan program anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.

b) Melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan protokol, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga.

Asisten Administrasi terdiri dari :

a) Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas yaitu melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta membina administrasi keuangan.

Fungsi-fungsi Bagian Keuangan terdiri dari :

(1) Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.

- (3) Melakukan koordinasi perumusan peningkatan dan pembinaan pendapatan daerah.
- (4) Menguji kebenaran penagihan dan peningkatan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan.

Sub Bagian Keuangan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Pendapatan Daerah;
- (2) Sub Bagian Anggaran;
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan;
- (4) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

b) Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas yaitu mencatat aset-aset pemerintah, mencatat surat masuk dan keluar pemerintah kota Palembang, dan menyiapkan acara-acara dinas walikota.

Fungsi-fungsi Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari:

- (1) Menyusun rencana dan program kerja Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas.

- (3) Mengumpulkan bahan dan koordinasi kegiatan tata usaha pimpinan dan protokol.
- (4) Mengumpulkan bahan koordinasi pembinaan kearsipan.
- (5) Mengumpulkan koordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga sekretaris daerah.

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Protokol;
- (2) Sub Bagian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian;
- (4) Sub Bagian Rumah Tangga;
- (5) Sub Bagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
- (6) Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Perindustrian;

4. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang

Visi Pemerintah Kota Palembang adalah “ mewujudkan Kota Palembang sebagai salah satu Kota Internasional yang senantiasa dinamis dalam merespon semua peluang dan tuntutan global, disertai dengan kepedulian tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya”. Sedangkan Misi Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermoral, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana perkotaan sesuai rencana tata ruang yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan jejaring kerja antar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri.
- e. Melanjutkan reformasi birokrasi baik secara kultural maupun struktural untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
- f. Meningkatkan keamanan, ketertiban masyarakat secara adil dan merata serta mendorong terlaksananya penegakan hukum.
- g. Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup, warisan sejarah dan budaya.

Tabel IV.1
REKAP REALISASI APBD
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN		
	1. Pendapatan Asli Daerah		
	- Pajak Daerah	44.100.000.000,00	37.862.702.142,00
	- Retribusi Daerah	51.655.251.000,00	39.904.051.546,00
	- Hasil perusahaan milik daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diprioritaskan	3.000.000.000,00	2.820.766.464,71
	- Lain-lain pendapatan yang sah	7.102.740.965,00	5.512.585.294,50
	2. Dana Perimbangan	105.857.991.965,00	86.100.105.448,21
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	183.549.214.300,00	187.280.082.856,66
	- Dana Alokasi Umum	351.714.000.000,00	351.714.000.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Bantuan keuangan dari propinsi	0,00	0,00
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
	JUMLAH PENDAPATAN	641.121.206.265,00	625.094.188.304,00
II	BELANJA		
	A. 1. Belanja rutin	0,00	0,00
	2. Belanja Pembangunan	0,00	0,00
	B. 1. Belanja Aparatur Daerah	28.891.071.407,00	27.396.097.888,00
	2. Belanja Pelayanan Publik	290.718.556.721,00	287.480.312.385,00
	3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	16.866.996.572,00	14.234.225.905,40
	4. Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	3.080.577.968,00
	JUMLAH BELANJA	341.476.624.700,00	332.191.214.146,40
III	PEMBIAYAAN		
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	27.038.424.900,00	27.038.424.900,00
	- Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu	27.038.424.900,00	27.038.424.900,00
	- Dana Bergulir	0,00	0,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.024.903.000,00	2.811.924.713,25
	JUMLAH NETTO PEMBIAYAAN	21.013.521.900,00	24.226.430.196,25

Sumber: Pemerintah Kota Palembang, 2010

Tabel IV.2
REKAP REALISASI APBD
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2006

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN		
	1. Pendapatan Asli Daerah		
	- Pajak Daerah	43.225.000.000,00	45.057.348.825,80
	- Retribusi Daerah	61.041.972.527,00	40.375.914.272,50
	- Hasil perusahaan milik daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diprioritaskan	1.000.000.000,00	821.389.463,07
	- Lain-lain pendapatan yang sah	6.680.855.777,00	10.948.198.417,00
	2. Dana Perimbangan	112.947.828.304,00	97.202.850.978,37
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	211.272.618.690,00	206.182.079.832,16
	- Dana Alokasi Umum	551.149.000.000,00	551.149.000.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	9.963.284.600,00	9.940.000.000,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Bantuan keuangan dari propinsi	33.224.107.400,00	29.513.792.076,00
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	918.556.838.994,00	893.987.722.886,53
II	BELANJA		
	B. 1. Belanja rutin	0,00	0,00
	2. Belanja Pembangunan	0,00	0,00
	B. 1. Belanja Aparatur Daerah	34.442.360.616,00	33.048.267.279,00
	2. Belanja Pelayanan Publik	355.777.927.787,00	352.988.516.871,00
	3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	23.985.491.939,00	20.773.135.594,00
	4. Belanja Tidak Terduga	3.614.234.291,00	3.332.033.715,00
	JUMLAH BELANJA	417.820.014.633,00	410.141.953.459,00
III	PEMBIAYAAN		
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	16.502.051.300,00	16.056.256.731,54
	- Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu	15.706.251.300,00	15.706.256.731,54
	- Dana Bergulir	795.800.000,00	360.000.000,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.234.696.979,00	1.453.532.507,17
	JUMLAH NETTO PEMBIAYAAN	14.267.354.321,00	14.612.724.224,37

Sumber: Pemerintah Kota Palembang, 2010

Tabel IV.3
REKAP REALISASI APBD
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2007

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN		
	1. Pendapatan Asli Daerah		
	- Pajak Daerah	51.475.000.000,00	51.486.867.607,06
	- Retribusi Daerah	55.999.049.227,00	48.572.158.218,00
	- Hasil perusahaan milik daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Yang diprioritaskan	2.750.000.000,00	2.366.826.719,28
	- Lain-lain pendapatan yang sah	21.325.035.465,20	39.702.466.760,13
	2. Dana Perimbangan	131.549.084.692,20	142.128.319.304,47
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169.619.149.177,00	185.486.023.527,00
	- Dana Alokasi Umum	659.611.000.000,00	714.579.500.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	8.387.000.000,00	13.403.619.819,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Bantuan keuangan dari propinsi	115.572.413.486,41	113.123.833.205,58
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.084.738.647.355,00	1.168.721.295.856,05
II	BELANJA		
	C. 1. Belanja rutin	0,00	0,00
	2. Belanja Pembangunan	0,00	0,00
	B. 1. Belanja Aparatur Daerah	39.104.764.820,00	36.319.982.409,00
	2. Belanja Pelayanan Publik	390.821.794.577,00	377.109.639.094,00
	3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	27.021.331.797,00	24.518.691.920,00
	4. Belanja Tidak Terduga	3.285.453.749,00	3.251.103.685,00
	JUMLAH BELANJA	460.233.344.943,00	441.199.417.108,00
III	PEMBIAYAAN		
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	12.920.018.545,00	12.298.942.966,34
	- Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu	11.234.218.545,00	11.102.998.545,34
	- Dana Bergulir	1.685.800.000,00	1.195.944.421,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.250.000.000,00	843.587.985,00
	JUMLAH NETTO PEMBIAYAAN	11.670.018.545,00	11.455.354.981,34

Sumber: Pemerintah Kota Palembang, 2010

Tabel IV.4
REKAP REALISASI APBD
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi
I	PENDAPATAN		
	1. Pendapatan Asli Daerah		
	- Pajak Daerah	69.350.000.000,00	69.367.592.779,00
	- Retribusi Daerah	65.332.735.137,00	59.055.021.400,00
	- Hasil perusahaan milik daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diprioritaskan	8.000.000.000,00	1.951.494.846,80
	- Lain-lain pendapatan yang sah	29.632.539.011,00	41.009.442.525,97
	2. Dana Perimbangan	172.315.274.148,00	171.383.551.551,77
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	196.337.645.697,00	215.398.072.258,00
	- Dana Alokasi Umum	716.129.540.000,00	716.129.540.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	8.387.000.000,00	8.387.000.000,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Bantuan keuangan dari propinsi	116.697.764.687,39	98.207.770.734,64
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.209.867.224.532,39	1.209.505.934.544,41
II	BELANJA		
	D. 1. Belanja rutin	0,00	0,00
	2. Belanja Pembangunan	0,00	0,00
	B. 1. Belanja Aparatur Daerah	29.532.080.616,00	28.372.858.173,00
	2. Belanja Pelayanan Publik	250.181.275.401,00	242.852.195.911,00
	3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	15.776.503.183,00	13.543.765.122,00
	4. Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	4.033.213.672,00
	JUMLAH BELANJA	301.489.859.200,00	288.802.032.900,00
III	PEMBIAYAAN		
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	30.121.800.567,00	30.121.800.567,00
	- Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu	30.121.800.567,00	30.121.800.567,00
	- Dana Bergulir	0,00	0,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.850.901.000,00	3.131.503.112,05
	JUMLAH NETTO PEMBIAYAAN	23.270.899.560,00	26.990.297.450,05

Sumber: Pemerintah Kota Palembang, 2010



Tabel IV.5
REKAP REALISASI APBD
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN		
	1. Pendapatan Asli Daerah		
	- Pajak Daerah	87.485.932.360,00	84.696.563.176,60
	- Retribusi Daerah	64.629.000.000,00	51.274.328.286,00
	- Hasil perusahaan milik daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diprioritaskan	10.000.000.000,00	8.402.352.751,46
	- Lain-lain pendapatan yang sah	56.477.729.450,00	26.167.404.947,67
	2. Dana Perimbangan		
	- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	262.774.112.054,00	209.496.203.477,00
	- Dana Alokasi Umum	689.108.622.000,00	689.108.622.000,00
	- Dana Alokasi Khusus	11.770.000.000,00	11.770.000.000,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Bantuan keuangan dari propinsi	154.489.890.081,76	138.256.236.660,47
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.336.735.285.945,76	1.219.171.711.299,20
II	BELANJA		
	E. 1. Belanja rutin	0,00	0,00
	2. Belanja Pembangunan	0,00	0,00
	B. 1. Belanja Aparatur Daerah	35.509.100.821,00	32.313.532.123,00
	2. Belanja Pelayanan Publik	225.352.911.670,00	202.512.811.432,00
	3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	22.901.211.125,00	21.812.940.560,00
	4. Belanja Tidak Terduga	2.755.965.155,00	2.122.312.912,00
	JUMLAH BELANJA	286.519.188.700,00	258.761.597.000,00
III	PEMBIAYAAN		
	1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	17.818.561.300,00	17.191.683.352,00
	- Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu	15.281.477.976,00	15.211.422.561,00
	- Dana Bergulir	2.537.083.330,00	1.980.260.790,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.534.933.619,00	2.921.433.532,00
	JUMLAH NETTO PEMBIAYAAN	14.283.627.680,00	14.270.249.820,00

Sumber: Pemerintah Kota Palembang, 2010

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan data target dan realisasi APBD Pemerintah Kota Palembang tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009, berikut ini dilakukan analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang.

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palembang

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan-peleyanan pada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin tinggi pula tingkat partisipasi rakyat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Di dalam Bab II telah dicermati bahwa rasio kemandirian dapat diperoleh dengan membandingkan PAD dengan pendapatan daerah atau total APBD tahun bersangkutan.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Berdasarkan rumus di atas dapat dihitung rasio kemandirian kuangan daerah antara target dan realisasi tiap tahunnya.

Tabel IV.6
Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Pemerintah
Kota Palembang
Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun Anggaran	Keterangan	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan
2005	Target	105.857.991.965,00	641.121.206.265,00
	Realisasi	86.100.105.448,21	625.094.188.304,87
2006	Target	112.947.828.304,00	918.556.838.994,00
	Realisasi	97.202.850.978,37	893.987.722.886,53
2007	Target	131.549.084.692,20	1.084.738.647.355,61
	Realisasi	142.128.319.304,47	1.168.721.295.856,05
2008	Target	172.315.274.148,00	1.209.867.224.532,39
	Realisasi	171.383.551.551,77	1.209.505.934.544,41
2009	Target	218.592.661.810,00	1.336.735.285.945,76
	Realisasi	170.540.649.161,73	1.219.171.711.299,20

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Tahun 2010

Tabel IV.7
Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2005 – 2009

Tahun Anggaran	Target		Realisasi		Persentase Perubahan
	Perhitungan	Rasio Kemandirian	Perhitungan	Rasio Kemandirian	
2005	105.857.991.965,00 641.121.206.265,00	16,51%	86.100.105.448,21 625.094.188.304,87	13,77%	2,74%
2006	112.947.828.304,00 918.556.838.994,00	12,29%	97.202.850.978,37 893.987.722.886,53	10,87%	1,42%
2007	131.549.084.692,20 1.084.738.647.355,61	12,12%	142.128.319.304,47 1.168.721.295.856,05	12,16%	0,04%
2008	172.315.274.148,00 1.209.867.224.532,39	14,24%	171.383.551.551,77 1.209.505.934.544,41	14,16%	0,08%
2009	218.592.661.810,00 1.336.735.285.945,76	16,35%	170.540.649.161,73 1.219.171.711.299,20	13,98%	2,37%
Rata-rata		14,30%		12,98%	

Sumber : Diolah dari Tabel IV.1, Tahun 2011

Berdasarkan perhitungan rasio yang ditunjukkan dalam tabel IV. 2 terlihat bahwa perbandingan antara rasio kemandirian yang dihitung dari target dan realisasi selalu menunjukkan penurunan. Dalam tahun 2005 rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 16,51 % sedangkan rasio kemandirian yang tercapai sebesar 13,77 %. Dari perhitungan ini dapat dilihat bahwa dalam tahun 2005 terjadi penurunan atas rasio kemandirian sebesar 2,74 %. Hal ini disebabkan dalam tahun 2005 PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 105.857.991.965,00 (lihat tabel IV.1) sedangkan PAD yang terealisasi sebesar Rp. 86.100.105.448,21 (lihat tabel IV.1) menurun sebesar Rp. 1.975.788.646,21.

Dalam tahun 2006 perbandingan rasio kemandirian yang ditargetkan dengan yang terealisasi pun mengalami penurunan dimana rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 12,29 % dan rasio kemandirian yang terealisasi sebesar 10,87 % menurun sebesar 1,42 %. Hal ini disebabkan dalam tahun 2006 PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 112.947.828.304,00 (lihat tabel IV.2) sedangkan PAD yang terealisasi sebesar Rp. 97.202.850.978,37 (lihat tabel IV.2) menurun sebesar Rp. 1.574.497.733,37.

Pada tahun 2007 perbandingan rasio kemandirian yang ditargetkan dengan yang terealisasi mengalami peningkatan dimana rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 12,12 % dan rasio kemandirian yang terealisasi sebesar 12,16 % meningkat sebesar 0,04%. Hal ini disebabkan dalam tahun 2007 PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 131.549.084.692,20 (lihat tabel IV.3) sedangkan PAD yang terealisasi sebesar Rp.

142.128.319.304,47 (lihat tabel IV.3) meningkat sebesar Rp. 105.792.347,27.

Pada tahun 2008 perbandingan rasio kemandirian yang ditargetkan mengalami penurunan kembali dimana rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 14,24 % dan rasio kemandirian yang terealisasi sebesar 14,16 % menurun sebesar 0,08 %. Hal ini disebabkan dalam tahun 2008 PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 172.315.274.148,00 (lihat tabel IV.4) sedangkan PAD yang terealisasi sebesar Rp. 171.383.551.551,77 (lihat tabel IV.4) menurun sebesar Rp. 931.722.677,77.

Sedangkan pada tahun 2009, rasio kemandirian yang ditargetkan yaitu sebesar 16,35 % mengalami penurunan pada rasio kemandirian yang terealisasi yaitu menjadi 13,98 % atau menurun sebesar 2,37 %. Hal ini disebabkan dalam tahun 2009 PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 218.592.661.810,00 (lihat tabel IV.5) sedangkan PAD yang telah terealisasi sebesar Rp. 170.540.649.161,73 (lihat tabel IV.5) menurun sebesar Rp. 480.520.127,73.

2. Analisis Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palembang

Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan efektivitas apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kemampuan suatu daerah. Analisis ini diperoleh dengan

membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD pada periode yang ditentukan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Target penerimaan PAD yg ditetapkan}}$$

berdasarkan potensi riil

Tabel IV.8
Data Untuk Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2005 – 2009

Tahun Anggaran	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
2005	105.857.991.965,00	86.100.105.448,21
2006	112.947.828.304,00	97.202.850.978,37
2007	131.549.084.692,20	142.128.319.304,47
2008	172.315.274.148,00	171.383.551.551,77
2009	218.592.661.810,00	170.540.649.161,73

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Tahun 2010

Tabel IV.9
Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2005 – 2009

Tahun Anggaran	Perhitungan	Rasio Efektivitas	Persentase Perubahan
2005	86.100.105.448,21 105.857.991.965,00	81,33%	-
2006	97.202.850.978,37 112.947.828.304,00	86,05%	(4,72%)
2007	142.128.319.304,47 131.549.084.692,20	108,04%	21,99%
2008	171.383.551.551,77 172.315.274.148,00	99,45%	(8,59%)
2009	170.540.649.161,73 218.592.661.810,00	78,01%	(21,44%)
Rata-rata		90,57%	

Sumber : Diolah Dari Tabel IV.3, Tahun 2011

Dari perhitungan rasio yang ditunjukkan dalam tabel IV.4 dapat dikatakan bahwa pada tahun 2005 rasio efektivitas Pemerintah Kota Palembang cukup baik dimana rasio efektivitas Pemerintah Kota Palembang hampir mendekati 81,33 %. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya penerimaan PAD sebesar Rp. 86.100.105.448,21 (lihat tabel IV.1) walaupun kurang tercapainya dari target PAD yang telah terealisasi yaitu sebesar Rp. 105.857.991.965,00 (lihat tabel IV.1).

Pada tahun 2006 rasio efektivitas mencapai 86,05 % atau mengalami penurunan sebesar 4,72 %. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya penerimaan PAD sebesar Rp. 97.202.850.978,37 (lihat tabel IV.2) walaupun kurang tercapai dari target PAD yang telah terealisasi yaitu sebesar Rp. 112.947.828.304,00 (lihat tabel IV.2).

Beda halnya dengan tahun 2007 dimana rasio efektivitas Pemerintah Kota Palembang mengalami peningkatan yaitu semula sebesar 86,05 %. Meningkat sebesar 21,99 % menjadi 108,04 %. Hal ini ditunjukkan pada tingginya penerimaan PAD sebesar Rp. 131.549.084.692,20 (lihat tabel IV.4) serta tercapainya dari target PAD yang telah terealisasi yaitu sebesar Rp. 142.128.319.304,47 (lihat tabel IV.3).

Dalam tahun 2008 rasio efektivitas mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 99,45 % atau menurun 8,59 % dari rasio tahun 2007 yaitu sebesar 108,04 %. Hal ini ditunjukkan pada tingginya penerimaan PAD sebesar Rp. 171.383.551.551,77 (lihat tabel IV.4) serta kurang tercapainya

target PAD yang telah terealisasi yaitu sebesar Rp. 172.315.274.148,00 (lihat tabel IV.4).

Pada tahun 2009 rasio efektivitas mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 78,01 % atau menurun 21,44 % dari rasio tahun 2008 yaitu sebesar 99,45 %. Rasio tersebut memperlihatkan bahwa keuangan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD semakin buruk, dimana realisasi PAD tahun 2009 sebesar Rp. 170.540.649.161,73 (lihat tabel IV.5) tidak mencapai target yang telah terealisasi yaitu sebesar Rp. 218.592.661.810,00 (lihat tabel IV.5).

3. Analisis Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Palembang

Analisis rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi dari penerimaan PAD itu sendiri. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang di keluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD tidak dicantumkan secara rinci di dalam APBD Pemerintah Kota Palembang sehingga biaya tersebut ditetapkan sebesar 5 % perbulannya dari pemungutan pajak dan retribusi.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{(\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah}) \times (5\% \times 12 \text{ bln})}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel IV.10
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Pemerintah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2005 – 2009

Tahun Anggaran	Keterangan	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2005	Target	44.100.000.000,00	51.655.251.000,00	105.857.991.965,00
	Realisasi	37.862.702.142,00	39.904.051.546,00	86.100.105.448,21
2006	Target	43.225.000.000,00	61.041.972.527,00	112.947.828.304,00
	Realisasi	45.057.348.825,80	40.375.914.272,50	97.202.850.978,37
2007	Target	51.475.000.000,00	55.999.049.227,00	131.549.084.692,20
	Realisasi	51.486.867.607,06	48.572.158.218,00	142.128.319.304,47
2008	Target	63.350.000.000,00	65.332.735.137,00	172.315.274.148,00
	Realisasi	69.367.592.779,00	59.055.021.400,00	171.383.551.551,77
2009	Target	87.485.932.360,00	64.629.000.000,00	218.592.661.810,00
	Realisasi	84.696.563.176,00	51.274.328.286,00	170.540.649.161,73

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Tahun 2010

Tabel IV.11
Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2005 – 2009

Tahun Anggaran	Target		Realisasi		Persentase Perubahan
	Perhitungan	Rasio Efisiensi	Perhitungan	Rasio Efisiensi	
2005	$(44.100.000.000,00 + 51.655.251.000,00) \times (5\% \times 12)$ 105.857.991.965,00	31,60%	$(37.862.702.142,00 + 39.904.051.546,00) \times (5\% \times 12)$ 86.100.105.448,21	54,19%	(22,59%)
2006	$(43.225.000.000,00 + 61.041.972.527,00) \times (5\% \times 12)$ 112.947.828.304,00	55,38%	$(45.057.348.825,80 + 40.375.914.272,50) \times (5\% \times 12)$ 97.202.850.978,37	52,73%	2,65%
2007	$(51.475.000.000,00 + 55.999.049.227,00) \times (5\% \times 12)$ 131.549.084.692,20	49,01%	$(51.486.867.607,06 + 48.572.158.218,00) \times (5\% \times 12)$ 142.128.319.304,47	42,24%	6,77%
2008	$(63.350.000.000,00 + 65.332.735.137,00) \times (5\% \times 12)$ 172.315.274.148,00	44,80%	$(69.367.592.779,00 + 59.055.021.400,00) \times (5\% \times 12)$ 171.383.551.551,77	44,95%	(0,15%)
2009	$(87.485.932.360,00 + 64.629.000.000,00) \times (5\% \times 12)$ 218.592.661.810,00	41,75%	$(84.696.563.176,00 + 51.274.328.286,00) \times (5\% \times 12)$ 170.540.649.161,73	47,83%	(6,08%)
Rata-rata		44,50%		48,38%	

Sumber : Diolah Dari Tabel IV.5, Tahun 2011



Dari perhitungan rasio yang ditunjukkan dalam tabel IV.5 menunjukkan bahwa dalam tahun 2005 rasio efisiensi yang tercapai oleh Pemerintah Kota Palembang kurang baik yaitu 54,19 % dari rasio efisiensi yang ditargetkan yaitu sebesar 31,60 %. Hal ini disebabkan karena PAD yang dicapai yaitu sebesar Rp. 86.100.105.448,21 (lihat tabel IV.1) tidak melebihi PAD yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 105.857.991.965,00 (lihat tabel IV.1) mengalami penurunan sebesar Rp. 1.975.788.646,21 atau sebesar 1,86 % dari PAD yang ditargetkan.

Beda halnya dengan tahun 2006 peningkatan rasio efisiensi yang ditargetkan terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efisiensi yang ditargetkan sebesar 55,38 % menurun sebesar 2,65 % sehingga rasio efisiensi yang dicapai menjadi 52,73 %. Peningkatan dengan rasio efisiensi dalam tahun 2006 ini disebabkan karena PAD yang dicapai yaitu Rp. 97.202.850.978,37 (lihat tabel IV.2) telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 112.947.828.304,00 (lihat tabel IV.2) meningkat sebesar Rp. 1.574.497.733,37 atau sebesar 1,39 % Dari PAD yang ditargetkan.

Pada tahun 2007 peningkatan rasio efisiensi yang ditargetkan juga terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efisiensi yang ditargetkan sebesar 49,01 % menurun sebesar 6,77 % sehingga rasio efisiensi yang dicapai menjadi 42,24 %. Dengan meningkatnya rasio efisiensi pada tahun 2007 ini disebabkan karena PAD yang dicapai yaitu Rp. 142.128.319.304,47 (lihat tabel IV.3) telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp.

131.549.084.692,20 (lihat tabel IV.3) meningkat sebesar Rp. 105.792.347,27 atau sebesar 0,08 % dari PAD yang ditargetkan.

Pada tahun 2008 rasio efisiensi yang dicapai mengalami penurunan kembali sebesar 0,15 % dimana rasio efisiensi yang ditargetkan sebesar 44,80 % sedangkan rasio efisiensi yang dicapai sebesar 44,95 %. Dimana PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 172.315.274.148,00 (lihat tabel IV.4) tidak melebihi PAD yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 171.383.551.551,77 (lihat tabel IV.4) mengalami penurunan sebesar Rp. 9.317.226,77 atau sebesar 0,54 % dari PAD yang ditargetkan.

Sama halnya dengan tahun 2009, rasio efisiensi yang dicapai mengalami penurunan kembali sebesar 6,08 % dimana rasio efisiensi yang ditargetkan sebesar 41,75 % sedangkan rasio efisiensi yang dicapai sebesar 47,83 %. Penurunan PAD pun menjadi faktor memburuknya rasio efisiensi. Dimana PAD yang ditargetkan sebesar Rp. 218.592.661.810,00 (lihat tabel IV.5) menurun sebesar Rp. 480.520.127,73 atau sebesar 0,21 % sehingga PAD yang dicapai menjadi Rp. 170.540.649.161,73 (lihat tabel IV.5).

4. Analisis Rasio Keserasian Pemerintah Kota Palembang

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin persentase belanja investasi (Belanja

pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil.

Rasio belanja rutin diperoleh dengan membandingkan total belanja rutin dengan total APBD tahun yang bersangkutan.

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja rutin} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$$

Sedangkan rasio belanja pembangunan diperoleh dengan membandingkan total belanja pembangunan dengan total APBD yang bersangkutan.

$$\text{Rasio belanja Pembangunan Terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja pembangunan} \times 100\%}{\text{Total APBD}}$$

Belum adanya patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian sebagai daerah di Negara yang berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.

Pemerintah Kota Palembang pada tahun 2005 – 2009 tidak melakukan belanja rutin dan belanja pembangunan. Semua belanja dialokasikan untuk belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Sehingga untuk tahun 2005 – 2009 tidak dapat dihitung analisis rasio belanja rutin dan belanja pembangunan (Rasio Keserasian) karena tidak dialokasikannya untuk kedua belanja tersebut.

5. Analisis *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana daerah, selain menggunakan PAD, pemerintah daerah juga dapat menggunakan alternative sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan itu adalah:

a. Ketentuan yang menyangkut persyaratan

- 1). Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
- 2). *Debt Service Coverage Ratio* minimal 2,5

Debt Service Coverage Ratio ini dapat diperoleh dengan menghitung penjumlahan dari PAD, Bagian Daerah, dan Dana Alokasi Umum dikurang dengan belanja wajib, yang kemudian dibandingkan dengan total dari penjumlahan pokok angsuran, bunga, dan biaya pinjaman.

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (pokok angsuran} + \text{Bunga} + \text{Biaya Pinjaman)}}$$

Keterangan : PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

- b. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman
- 1). Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dari pelayanan masyarakat.
 - 2). Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas
- c. Ketentuan yang menyangkut prosedur
- 1). Mendapat persetujuan DPRD
 - 2). Dituangkan dalam kontrak

Tabel IV.12
PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK, Belanja Rutin, Pinjaman Serta Angsuran Pinjaman, Utang dan Bunga Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2005 – 2009

Tahun Anggaran	Keterangan	Pendapatan Asli Daerah	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
2005	Target	105.857.991.965,00	183.549.214.300,00	351.714.000.000,00	7.887.224.500,00
	Realisasi	86.100.105.448,21	187.280.082.856,66	351.714.000.000,00	7.117.333.000,00
2006	Target	112.947.828.304,00	211.272.218.290,00	551.149.000.000,00	9.963.284.600,00
	Realisasi	97.202.850.978,37	206.182.079.832,16	551.149.000.000,00	9.940.000.000,00
2007	Target	131.549.084.692,20	169.619.149.177,00	659.611.000.000,00	8.387.000.000,00
	Realisasi	142.128.319.304,47	185.486.023.527,00	714.579.500.000,00	13.403.619.819,00
2008	Target	172.315.274.148,00	196.337.645.697,00	716.129.540.000,00	8.387.000.000,00
	Realisasi	171.383.551.551,77	215.398.072.258,00	716.129.540.000,00	8.387.000.000,00
2009	Target	218.592.661.810,00	262.774.112.054,00	689.108.622.000,00	11.770.000.000,00
	Realisasi	170.540.649.161,73	209.496.203.477,00	689.108.622.000,00	11.770.000.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang, Tahun 2010

Tahun Anggaran	Keterangan	Belanja Rutin	Pinjaman	Angsuran Pinjaman Utang dan bunga
2005	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00
2006	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00
2007	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00
2008	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00
2009	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang, Tahun 2010

Tabel IV.13
Perhitungan Debt Service Coverage Ratio Pemerintah Kota Palembang

Tahun Anggaran	Target			Realisasi		
	Perhitungan	DSCR	Max Anggaran pokok Pinjaman	Perhitungan	DSCR	Max Anggaran pokok Pinjaman
2005	6.411.212.062,00-7.887.224.500,00 0,00	00	0,00	6.250.941.882,87-7.117.333.000,00 0,00	00	0,00
2006	8.753.690.465,00-9.963.284.600,00 0,00	00	0,00	8.545.339.308,53-9.940.000.000,00 0,00	00	0,00
2007	9.607.792.337,20-8.387.000.000,00 0,00	00	0,00	1.042.193.843,47-13.403.619.819,00 0,00	00	0,00
2008	1.084.782.460,00-8.387.000.000,00 0,00	00	0,00	1.102.911.164,77-8.387.000.000,00 0,00	00	0,00
2009	1.170.475.396,00-11.770.000.000,00 0,00	00	0,00	1.069.145.475,73-11.770.000.000,00 0,00	00	0,00
Rata-rata		00			00	

Sumber : Diolah Dari Tabel IV.5, Tahun 2011

Dari perhitungan rasio yang ditunjukkan dalam tabel IV.9 di atas maka dapat dilihat bahwa dalam tahun 2005, DSCR yang ditargetkan yaitu tak terhingga begitu pula dengan DSCR yang tercapai pun tak terhingga. DSCR yang tak terhingga berarti Pemerintah Kota Palembang dapat melakukan pinjaman untuk tahun berikutnya. Hal ini disebabkan

karena dalam tahun 2005 baik pokok angsuran, bunga maupun biaya pinjaman yang ditargetkan maupun yang terealisasi berjumlah Rp. 0,00 (lihat tabel IV.1), sehingga DSCR yang dihasilkan tak terhingga. Tahun 2006 dan 2007 pun DSCR yang ditargetkan tak terhingga sedangkan DSCR yang tercapai tak terhingga juga. Maka Pemerintah Kota Palembang pada tahun depan dapat melakukan pinjaman, karena DSCR yang dihasilkan tak terhingga. Begitu pula untuk tahun 2008 dan 2009, DSCR yang ditargetkan tak terhingga sedangkan DSCR yang tercapai tak terhingga juga. Untuk tahun depan Pemerintah Kota Palembang dapat melakukan pinjaman apabila terjadi kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya.

6. Analisis Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Palembang

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian.

Tabel IV.14
PAD, Total Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja
Pembangunan Pemerintah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2005 – 2009

Tahun Anggaran	Keterangan	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan
2005	Target	105.857.991.965,00	641.121.206.265,00	0,00	0,00
	Realisasi	86.100.105.448,21	625.094.188.304,87	0,00	0,00
2006	Target	112.947.828.304,00	918.556.838.994,00	0,00	0,00
	Realisasi	97.202.850.978,37	893.987.722.886,53	0,00	0,00
2007	Target	131.549.084.692,20	1.084.738.647.355,61	0,00	0,00
	Realisasi	142.128.319.304,47	1.168.721.295.856,05	0,00	0,00
2008	Target	172.315.274.148,00	1.209.867.224.532,39	0,00	0,00
	Realisasi	171.383.551.551,77	1.209.505.934.544,41	0,00	0,00
2009	Target	218.592.661.810,00	1.336.735.285.945,76	0,00	0,00
	Realisasi	170.540.649.161,73	1.219.171.711.299,20	0,00	0,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palembang, Tahun 2010

Tabel IV.15
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2005 – 2009

No	Keterangan	2005		2006		2007		2008		2009	
		Target	Realisasi								
1	Pertumbuhan PAD	0,00	(22%)	0,00	(16%)	0,00	8%	0,00	(0,54%)	0,00	(28%)
2	Pertumbuhan Total Pendapatan	0,00	(2%)	0,00	(2%)	0,00	7%	0,00	(90%)	0,00	(9%)
3	Pertumbuhan Belanja Rutin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pertumbuhan Belanja Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Diolah dari tabel IV.10, Tahun 2011

Dari perhitungan rasio yang ditunjukkan dalam tabel IV.11 di atas maka dapat diketahui bahwa dalam tahun 2005 pertumbuhan untuk PAD, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan

yang ditargetkan belum menunjukkan penurunan dan peningkatan sedangkan yang dihasilkan menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Hal ini dapat dilihat bahwa PAD yang terealisasi terjadi penurunan sebesar 22 % dari yang ditargetkan, total pendapatan yang dicapai meningkat sebesar 2 % dari total pendapatan yang ditargetkan, sedangkan total belanja rutin dan total belanja pembangunan tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan.

Pada tahun 2006 pertumbuhan untuk PAD, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan yang ditargetkan belum menunjukkan penurunan dan peningkatan sedangkan yang dihasilkan menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Hal ini dapat dilihat bahwa PAD yang terealisasi terjadi penurunan sebesar 16 % dari yang ditargetkan, total pendapatan yang dicapai meningkat sebesar 2 % dari total pendapatan yang ditargetkan, dan total belanja rutin dan belanja pembangunan pun tidak mengalami ataupun peningkatan.

Dalam tahun 2007 pertumbuhan untuk pendapatan asli daerah, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan yang ditargetkan belum menunjukkan penurunan dan peningkatan sedangkan yang dihasilkan menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Hal ini dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah yang terealisasi terjadi peningkatan sebesar 8 % dari yang ditargetkan, total pendapatan yang dicapai meningkat sebesar 7 % dari total pendapatan yang ditargetkan, dan total belanja rutin dan belanja pembangunanpun tidak mengalami ataupun peningkatan.

Sedangkan tahun 2008 pertumbuhan untuk PAD, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan yang ditargetkan belum menunjukkan penurunan dan peningkatan sedangkan yang dihasilkan menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Hal ini dapat dilihat bahwa PAD yang terealisasi terjadi penurunan sebesar 0,54 % dari yang ditargetkan, total pendapatan yang dicapai meningkat sebesar 90 % dari total pendapatan yang ditargetkan, dan total belanja rutin dan belanja pembangunanpun tidak mengalami peningkatan.

Dalam tahun 2009 pertumbuhan untuk PAD, total pendapatan daerah, total belanja rutin, dan total belanja pembangunan yang ditargetkan belum menunjukkan penurunan dan peningkatan sedangkan yang dihasilkan menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Hal ini dapat dilihat bahwa PAD yang terealisasi terjadi penurunan sebesar 28 % dari yang ditargetkan, total pendapatan yang dicapai meningkat sebesar 9 % dari total pendapatan yang ditargetkan, dan total belanja rutin dan belanja pembangunanpun tidak mengalami peningkatan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir dari penelitian ini, penulis memberikan simpulan dan saran mengenai kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Palembang.

A. Simpulan

1. Kemandirian Pemerintah Kota Palembang dalam memenuhi kebutuhan dana untuk memenuhi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah. Untuk tahun 2005 sampai 2009 sebesar 13,77 %, 10,87 %, 12,16 %, 14,16 %, dan 13,98 %. Minimnya angka tersebut disebabkan karena rata-rata tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Palembang terhadap dana pihak luar yaitu pemerintah pusat masih sangat tinggi. Selain itu rendahnya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah ini disebabkan kurangnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.
2. Rasio rata-rata efektivitas dan efisiensi selama tahun 2005 sampai 2009 yaitu sebesar 90 % dan 42 % menunjukkan efektif dan efisiennya pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan aparatur daerah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efektivitas yang kurang dari 100 % sedangkan rasio efisiensi yang berada dibawah 100 %.
3. Pemerintah Kota Palembang masih memprioritaskan pengeluarannya pada belanja ke bidang yang lain. Sehingga pada

tahun 2005 – 2009 tidak ada pengalokasian pengeluaran untuk belanja rutin dan belanja pembangunan.

4. Pada tahun 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009, DSCR Pemerintah Kota Palembang adalah tak terhingga sedangkan pada tahun 2009 DSCR Pemerintah Kota Palembang juga mengalami tak terhingga. Hal ini berarti Pemerintah Kota Palembang memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman jika daerah secara potensial mengalami kekurangan dana untuk mencukupi kebutuhan belanja daerahnya.
5. Pertumbuhan APBD tahun 2005 sampai 2009 mengalami pertumbuhan yang positif, walaupun sebagai Pemerintah yang cukup maju akan tetapi telah mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya baik yang telah ada maupun yang potensial.

B. Saran

1. Agar PAD dapat menjadi sumber penerimaan yang ideal dan bersifat kontinyu, maka Pemerintah daerah selalu berusaha menggali sumber-sumber PAD, contohnya dengan meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Mengembangkan potensi-potensi kawasan pariwisata yang ada tetapi belum digarap dengan baik agar menjadi sumber penerimaan yang potensial dan terarah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
3. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM aparat pemerintah daerah khususnya yang mengelola keuangan daerah yaitu aparat yang melakukan pemungutan atau yang bekerja di lapangan.

Peningkatan kualitas ini dapat dilakukan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis maupun administratif.

4. Selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. 2006. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.

Fajar ferdianto. 2007. **Penerapan Rasio sebagai dasar penilaian kinerja keuangan pada pemerintah kota prabumulih.**

Halim, Abdul. 2004. **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

M. Iqbal Hasan. 2003. **Pokok-Pokok Materi Statistik Satu**, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, **Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.**

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903/2477/SJ Tanggal 5 Desember 2001, **Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.**

Sugiono. 2003. **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Ketujuh, Penerbit Alfa Beta, Bandung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 **Tentang Pemerintah Daerah.**

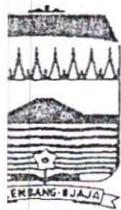
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 **Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 3173093

PALEMBANG



Palembang, 15 Desember 2010

or : 070/2335/Penda
: Biasa
iran : -
al : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

di-

P a l e m b a n g

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 151/G-17/FE-UMP/XII/2010 perihal seperti pada pokok surat tersebut diatas dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

Nama : Hendra Dewha Sastra
NIM : 22 2006 033
Jurusan : Akuntansi

Disetujui untuk Mengambil Data pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dimaklumi untuk dilaksanakan.

Demikian disampaikan.

a.n. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang
Sekretaris,



M. TABRANI, SE., MM
REMBINA TK. I
NIP.196108281983031012

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : Hendra Dewka Sastra	PEMBIMBING :
: 22 2006 033	KETUA : Lis Djuniar, SE, Msi
: Akuntansi	ANGGOTA :

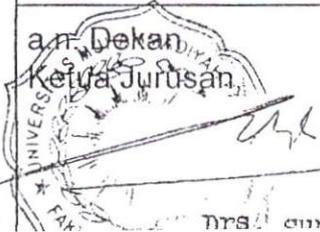
SKRIPSI : Analisis Kemampuan keuangan daerah pemerintah kota Palembang

L/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
2011	Bab I	<i>[Signature]</i>		Perbaiki!
2011	Bab I	<i>[Signature]</i>		Perbaiki!
2011	Bab I	<i>[Signature]</i>		Acc
2011	Bab II	<i>[Signature]</i>		Perbaiki!
2011	Bab II	<i>[Signature]</i>		Acc
2011	Bab III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki!
2011	Bab I, II, III	<i>[Signature]</i>		Acc
2011	Bab IV	<i>[Signature]</i>		Perbaiki!
2011	Bab V	<i>[Signature]</i>		Perbaiki!
2011	Bab VI & VII	<i>[Signature]</i>		Perbaiki!
2011	Bab VIII & IX	<i>[Signature]</i>		Perbaiki!
2011	Bab X & XI	<i>[Signature]</i>		Acc

diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, dihitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /

a.n. Dekan
 Ketua Jurusan



SURAT KETERANGAN

Pembantu Dekan IV FE UMP, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hendra. dewha. Castra

Nim : 22 2006 033

Jurusan : Akuntansi

Benar telah LULUS hafalan surat-surat pendek, dan menunggu diterbitkan sertifikat.

Demikian keterangan ini agar dapat digunakan untuk mendaftar ujian konprehenship sementara sertefikat belum dikeluarkan.

Palembang, 23 - 2 - 2011

Pembantu Dekan IV FE



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (S1)

JURUSAN AKUNTANSI (S1)

MANAJEMEN PEMASARAN (D III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No 3450/D/T/2005

: No 3449/D/T/2005

: No 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII/2003 (B)

No 020/BAN-PT/Ak-IXI/S1/X/2005 (B)

No 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpi-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu ☎(0711) 511488 Facsimile 518018 Palembang 30263



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Jum'at 4 Maret 2011
Waktu : 13.00 WIB
Nama : HENDRA DEWHA SASTRA
Nim : 222006033
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

**TELAH DIPERBAIKI DAN DI SETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING
SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Lis Djuniar, SE., MSi	Pembimbing	15-03-2011	
2	Drs. Sunardi, SE., M.Si	Ketua Penguji	16-03-2011	
3	Lis Djuniar, SE., MSi	Anggota Penguji I	15-03-2011	
4	M. Fahmi, SE., M.Si	Anggota Penguji II	17-03-2011	

Palembang, Maret 2011

A.n Dekan

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Sunardi, SE., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : Hendra Dewha Sastra
NIM : 222006033
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Februari 1987
Alamat : Jl. Taman Sari II Rt 02/Rw 01 No. 74 Km. 6
Pertanian
Telepon : 081373253502
Nama Orang Tua
1. Ayah : Mas'ud Zakaria
2. Ibu : Fadilah
Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : PNS
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua
1. Ayah : Jl. Taman Sari II Rt 02/Rw 01 No. 74 Km. 6
Pertanian
2. Ibu : Jl. Taman Sari II Rt 02/Rw 01 No. 74 Km. 6
Pertanian

Palembang, Februari 2011
Penulis

Hendra Dewha Sastra